



JAMBORA JOURNAL CIVIC EDUCATION
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>
E-ISSN : 2798-4818
P-ISSN: 2808-2249

Menabur Benih Multikulturalisme Di Tengah Mandeknya Konsolidasi Demokrasi di Tingkat lokal

Sastro M Wantu¹, Ramli Mahmud², Zulfikar Adjie³, Asmun Wantu⁴

¹²³⁴Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

(sastrowantu@ung.ac.id)

(ramlimahmud@ung.ac.id)

(zulfikaradjie@ung.ac.id)

(asmunwantu@ung.ac.id)

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima (okt) (2023)

Disetujui (nov) (2023)

Dipublikasikan (nov)
(2023)

Keywords:

Menabur,
Multikulturalisme,
Konsolidasi, Demokrasi

Abstrak

Multikulturalisme dianggap sebagai model gagasan yang diharapkan untuk meredam ketegangan dimasyarakat pluralisme di daerah, meskipun ide ini sejak pasca reformasi mengalami ketegangan pasung surut dalam hal menerima dan mengakui keberagaman sosial. Kajian empiris ini mendiskusikan formulasi kebijakan pada masyarakat heterogen yang ingin mendapatkan konseptualisasi yang hakiki terhadap keharmonisan sosial dalam fondasi kedaerahan, agama dan kebudayaan yang berbeda. Hasil studi memperlihatkan bahwa faktor penyebab pendekatan multikulturalisme merupakan elemen penting dalam membangun sebuah pemerintahan yang bergerak menuju konsolidasi demokrasi yang pada akhirnya menciptakan kesadaran yang mampu memanejemen konflik masyarakat. Situasi ini secara langsung mempengaruhi terhadap menurunnya eskalasi konflik etnis yang setiap saat muncul dan dipicu oleh persoalan SARA. Pemerintahan lokal yang memiliki kebijakan besar berupa agenda *political will* dalam mengkonsolidasikan demokrasi melalui upaya membangun multikulturalisme dan bukan sebaliknya yakni membangkitkan ego sektoral melalui ego etnisitas. Untuk itu kajian ini menyarankan perlu adanya peran pemerintah termasuk di tingkat lokal membangun keharmonisan di tengah kebhinekaan untuk mencegah konflik horizontal dalam bentuk yang laten maupun termanifest.

2023 Universitas Negeri Gorontalo
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Paradigma baru dalam membangun demokrasi di tingkat lokal melalui penguatan terhadap desentralisasi atau otonomi daerah telah menjadi kebijakan besar pemerintah

pasca reformasi dalam mengantisipasi disintegrasi bangsa yang hampir saja memperakporandakan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai konflik etnis lahir diberbagai daerah seperti Poso, Kalimantan, Maluku dan beberapa daerah lainnya. Mengapa gejolak konflik ini bisa terjadi kapan saja di tengah keragaman etnis, pada hal bangsa ini punya ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan fenomena pluralisme masyarakat Indonesia tersebut, tampak di beberapa daerah menjelang dan pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru masalah kesukuan masih sangat memprihatinkan, karena terjadi benturan perbedaan yang cenderung melahirkan konflik horisontal.

Kegagalan konsolidasi demokrasi dalam menampilkan wajah kompleksitas pluralitas dengan membangun paradigma keharmonisan sosial melalui multikulturalisme yang selalu mendapat tantangan besar di Indonesia yang masyarakatnya di daerah memiliki ciri keragaman etnis. Prahara konflik diberbagai wilayah selalu muncul ketika etnis mayoritas mendominasi minoritas dengan cara memarginalkannya dalam tatakelola sosial ekonomi atau sebaliknya etnis minoritas menguasai etnis mayoritas. Untuk itu kebijakan rezim selalu direduksi dengan cara ideologis dengan memberi harapan besar berupa cara memperkuat rasa nasionalisme, dan bhinneka tunggal ika bukan dengan cara yang bersifat ideologis yang bersifat implementatif untuk membangun kewargaan multikulturalisme yang diwujudkan melalui demokrasi dengan mengatur keberagaman berdasarkan prinsip pengakuan dan relasi sosial antara mayoritas dan minoritas

Sejauh ini studi tentang konsolidasi demokrasi dapat dilihat dari karya Larry Diamond (2003) yang menyatakan bahwa demokrasi sesungguhnya kemampuan merawat stabilitas dan persistensi demokrasi itu sendiri dimana para elvel elit dan massa percaya bahwa rezim demokrasi adalah yang paling benar dan tepat bagi mereka. Untuk itu bagaimana merawat konsolidasi demokrasi menurut Stalik (2003) dan Bennett (1994) konsolidasi demokrasi paling efektif dan representative dalam memupuk demokrasi antara lain memberikan semacam akses bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, sehingga akan meningkatkan keterwakilan demokrasi.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang kurang memperhatikan faktor konsolidasi demokrasi sebagai komitmen untuk memperkuat vitalitas kewarganegaraan yang peduli terhadap keterwakilan minoritas warga. Nilai multikulturalisme belum menjadi perhatian penting bagi negara berkembang termasuk

Indonesia yang memposisikan keterampilan demokrasi warga melalui upaya yang memberikan saluran pada level pengakuan akan keberagaman dengan cara memberikan akses bagi kelompok-kelompok yang majemuk termasuk kelompok minoritas. Manfaat kajian ini pemetaan terhadap analisa penerimaan nilai multikulturalisme selain menghasilkan gambaran kompleksnya membangun nilai demokrasi dalam masyarakat heterogen.

Tulisan ini didasarkan pada pandangan bahwa multikulturalisme dalam budaya kewarganegaraan menjadi faktor penting dalam membangun konsolidasi demokrasi yang menempatkan warga memiliki peluang dalam berbagai macam akses dalam demokrasi, termasuk adanya gagasan terhadap aturan main yang harmonis antara kelompok minoritas dan mayoritas yang saling menerima dan mengakui satu sama lain. Selanjutnya tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa tidak mengakui keberagaman sosial dan membangun diskriminasi dalam tradisi kewarganegaraan melalui rezim otoritarian menghasilkan adanya ketidak harmonisan etnis. Hubungan yang menciptakan relasi sosial yang negatif ini tentu menjadi simbol terhadap disintegrasi bangsa yang selalu mempraktekkan nilai diskriminasi terhadap kelompok-kelompok etnis minoritas dalam masyarakat. Praktek penyakit sosial dalam penataan pada kehidupan kewarganegaraan menciptakan segmentasi sosial yang menggagu terbangunnya demokrasi warga. Pertanyaan yang muncul apakah multiukulturalisme sangat relevan dalam masyarakat heterogen yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Sugiono mengemukakan bahwa penelitian studi kasus merupakan sebuah instrumen penelitian yang lebih memfokuskan pengembangan sumber informasi atas program, peristiwa serta aktivitas kerja yang ingin diteliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini fokus kasus yang dijadikan sebagai permasalahan yaitu pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks Multikulturalisme Dan Demokrasi Lokal

Sesungguhnya bangsa Indonesia secara empiris, perspektif nilai multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat telah dianggap menjadi penting dari perjalanan bangsa yang dikenal dengan kemajemukannya. Pada realitanya bila mengacu pada praktek multikulturalisme di negara Barat hampir semua mampu membangun dan menata keberagaman dengan prinsip pengakuan akan adanya nilai-nilai yang berbeda. Namun tidak sedikit pula berbagai kegagalan total dalam implementasinya misalnya runtuhnya Uni Sovyet, Yugoslavia dan beberapa persoalan negara lainnya yang tidak sampai menyebabkan bubarnya negara tersebut seperti yang dialami oleh Spanyol, Kanada yang hingga kini masih berupaya merajut keutuhan negaranya.

Dilihat dari berbagai kompleksitas Indonesia dalam membangun kebangsaan atau dalam bingkai heterogenitas sedapat mungkin salah satu obat penawar dalam membangun konsolidasi demokrasi yang mampu mempertahankan integrasi bangsa salah satunya adalah kebutuhan adanya pespektif multikulturalisme yang dianggap sebagai cerminan keterwakilan dalam merefleksikan keragaman masyarakat melalui nilai toleransi dan tidak diskriminatif. Tumbangnya Orde Baru yang mengakhiri rezim kekuasaannya dengan meledaknya gelombang kerusuhan sosial diberbagai daerah misalnya di Jakarta, Solo dan Medan tentang ketidakpuasan terhadap warga keturunan Cina, konflik di Kalimantan antara Dayak dan Madura, Maluku, Sulawesi Tengah yakni Poso. Konflik ini berlanjut hingga pasca reformasi dan terjadi diberbagai daerah baik di Lampung, Sulawesi Utara (Minahasa), Luwuk Banggai.

Kemunculan konflik yang berlatar agama dan etnis bila ditelusuri selalu berawal dari penguasaan sumber daya alam oleh kelompok etnis tertentu yang yang memicu kesenjangan ekonomi, politik yang pada akhirnya memunculkan kecemburuan sosial dan berakhir pada konflik horisontal yang telah menelan korban jiwa. Kondisi ini dianggap peristiwa yang tidak mungkin dilupakan dalam sejarah kemanusiaan yang kelam dialami oleh daerah-daerah yang terlibat konflik tersebut.

Timbulnya konflik pada dasarnya semuanya bermuara pada kegagalan dalam menempatkan isu kebudayaan (budaya politik) sebagai prioritas dan menggantikannya dengan isu politik dan ekonomi. Isu ini menguat lagi ketika resonansi konsolidasi demokrasi menggaung diseluruh masyarakat lokal dan mendapat sambutan yang hantgat

dari pemerintah pusat dengan memberikan otonomi daerah sejak tahun 1999 berupa transfer kewenangan pemerintah pusat ke daerah yang disambut dengan gembira oleh daerah yang selama ini dianak tirikan oleh pusat.

Pemerintah pusat merancang berbagai kebijakan yang bersifat nometetis untuk mengakomodir kepentingan daerah melalui produk reformasi pemerintah daerah yang dianggap sebagai pemicu ketidakstabilan politik lokal yang masyarakatnya dihuni oleh beragam etnis dan agama. Kebijakan ini pula menimbulkan penguatan identitas baru yang selama Orde Baru diredam melalui asimilasi antara lain melalui kebijakan transmigrasi. Hal ini menurut Abdullah (2005) kebijakan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dewasa ini memperlihatkan persoalan sebagai berikut: Pertama, persoalan mengabaikan dimensi sosial dan budaya. Kedua, kecenderungan selain tidak adanya pemahaman yang jelas tentang apa yang disebut sebagai lokal Karena itu bagi bangsa yang pluralitas seperti ini kebutuhan adanya multikulturalisme sedapat mungkin menjadi milik bersama diatas realitas kemajemukan. Dalam posisi seperti ini kebijakan pemerintah bersama masyarakat memiliki andil penting agar heterogenitas menjadi kekuatan besar bangsa menghadapi globalisasi yang cenderung memperhatikan isu lokal yang bermuatan etnisitas

Namun demikian realita yang muncul sejak Orde Baru hingga kini terjadi fluktuasi kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memberi harapan besar diatas keraguan bahwa kemajemukan dan demokrasi sangat membahayakan eksistensi integrasi nasional. Sehingga ruang perbedaan etnisitas hampir selalu dihindari untuk didiskusikan karena bisa dianggap menjadi penghambat pembangunan dan integrasi bangsa sehingga seringkali etnis yang dianggap sebagai potensi menghalangi pembangunan tidak mendapat ruang untuk berkontribusi atau berpartisipasi apalagi menjadi bagian dari *check and balance*. Pada hal menurut World Bank pemberian desentralisasi sebagai prasyarat untuk memajukan demokrasi di tingkat lokal termasuk meningkatkan legitimasi politik, memberdayakan kelompok-kelompok termarjinalkan atas dasar etnisitas dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal (Maloney, 2007).

Lebih jauh keraguan pemerintah kembali muncul ketika dimensi lokal mulai menguat terhadap pusat yang cenderung mulai melakukan perlawanan bisa dilihat keengganan pemerintah lokal diintervensi dalam memilih pemimpinnya yang cenderung menciptakan dinasti dan raja kecil di daerah, pengrusakan sumberdaya alam, penciptaan

aturan lokal dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah) yang cenderung bertentangan dengan aturan nasional dan lebih kental lagi munculnya ego etnisitas yang membelah antara etnis mayoritas dan minoritas. Ketegangan seperti ini kembali dilihat oleh pemerintah pusat sebagai suatu yang membahayakan integrasi bangsa. Untuk itu penerapan otonomi daerah atau desentralisasi diharapkan tidak hanya mengadopsi kepentingan masyarakat di daerah termasuk menciptakan kesejahteraan, pemberdayaan, rasa keadilan, namun acapkali disalah gunakan oleh elit dan masyarakat yang mengakumulasi keanekaragaman sosial dalam dimensi penguasaan etnis mayoritas terhadap minoritas atau sebaliknya etnis minoritas mengambil kendali dan menguasai etnis mayoritas. Sehingga ego etnisitas tumbuh subur dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat dalam berbagai bidang baik tata kelola sumberdaya ekonomi, sosial dan politik lokal yang dianggap sebagai pemicu konflik-konflik di daerah baik bersifat laten maupun termanifest yang berbasis kemajemukan. Dengan melihat kecenderungan merebaknya ego etnisitas yang meluas tumbuh dalam segala elemen di tingkat lokal, maka politik multikulturalisme sesungguhnya secara tentative dianggap sebagai kebijakan yang mampu meredam gejolak persaingan kelompok etnis dan menjadi benteng untuk menjaga integrasi nasional supaya masyarakatnya harmonis, damai dan berkeadilan serta saling mengakui keberagaman.

Membangun Peradaban Melalui Perspektif Multikulturalisme

Dalam membangun peradaban yang berdimensi multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka kita perlu melihat kembali resep ilmu sosial yang sederhana namun mungkin bisa menjadi obat mujarab dalam merawat demokrasi melalui bangunan multikulturalisme. Konsep multikulturalisme sangat berbeda dengan pengertian pluralitas yang selalu dirumuskan dalam suku bangsa dan kebudayaannya. Sementara multikulturalisme menekankan pada hubungan atau interaksi antara kelompok yang satu dengan lainnya dengan mengakui, menghormati dan memposisikan kesetaraan dalam keberagaman sosial yang diimplementasikan dengan sikap saling toleransi. Oleh karena itu untuk mengimplementasi nilai mutikulturalisme dalam ruang publik yang demokrasi sepatutnya pemerintah memiliki *political will* untuk mengelola sistem sosial dari berbagai kebudayaan warganegara untuk ditata dalam kebijakan baik nasional maupun lokal dalam fondasi nilai keadilan, kesetaraan, saling mengakui dan mengormati.

Bagaimana model membangun politik multikulturalisme di tengah persoalan kebangkitan politik identitas yang cenderung melahirkan tindakan diskriminatif? Untuk membangun kebijakan tersebut sesungguhnya pemerintah dengan mudah mengkomdasi keberagaman tersebut dengan semangat nasionalisme yang sudah lama lahir dan tumbuh dalam kemajemukan Indonesia yang diakumulasi dalam integrasi nasional. Gagasan yang mudah dicerna ini bila kita melihat kembali (atavisme) sebagaimana dirumuskan oleh Masoed (1998) tentang perlunya pengkaitan yang tegas antara *nation-building* dengan pengembangan semangat kewarganegaraan yakni (1).membuka saluran untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang utuh terhadap sumberdaya negara.(2). Membangkitkan kembali nasionalisme dengan membuka diri untuk saling membantu dan saling memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh semua umat manusia. Selanjutnya menurut Masoed (1998) dengan mengutip pandangan Anderson tentang *imagined political community* yakni perlunya penciptaan solidaritas nasional melalui pengembangan imajinasi dikalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka, yang penting bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia .

Pandangan ini begitu memiliki nilai yang hakiki, karena fondasi *nation building* yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa telah menanamkan kesadaran secara mendalam dalam kehidupan masyarakat yakni walaupun memiliki keanekaragaman budaya, agama, bahasa dan etnis, namun kita tetap menjadi satu kesatuan bangsa yang didukung oleh rasa nasionalisme yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Bahar (1998) bahwa momen yang menentukan dalam proses *nation-building* adalah pada saat para pemimpin pergerakan kebangsaan Indonesia yang secara pribadi berasal dari berbagai latar belakang suku, ras, agama serta golongan, bermusyawarah bersama-sama meletakkan dasar-dasar memproklamirkan terbentuknya *nation state* Indonesia.

Konsepsi dan komitmen masa depan yang bersifat tentative untuk menabur benih-benih multiukulturalisme dalam lokus demokrasi bisa dipinjam pandangan Abdullah, (2006) mengenai tatanan masyarakat multikultural yang bisa diterima oleh masyarakat yakni setidaknya terdapat dua perspektif dalam menghadapi keragaman sebagai berikut: pertama, secara vertical membangun multikulturalisme melalui kesepakatan antara negara dan warga negara secara adil dengan tidak mengorbankan

kelompok minoritas; Kedua, secara horizontal multikulturalisme harus dibangun dengan pembelajaran bersama.

Dengan demikian membangun politik multikulturalisme sedapat mungkin untuk masing-masing warga negara tidak hanya menjaga kebudayaan sendiri, tetapi juga mengakui kebudayaan kelompok yang lain yang berbeda, sehingga tercipta toleransi, hidup berdampingan secara damai. Untuk menciptakan nuansa kehidupan yang bekerjasama dan berkeadilan, maka salah satu cara adalah memunculkan pendidikan multikulturalisme, seiring dengan rasa nasionalisme yang berdimensi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika .

KESIMPULAN

Dalam membangun kebangsaan dalam arena demokrasi pada masyarakat majemuk sesungguhnya bersifat kompleks karena bila tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu integrasi nasional dan terbukti Indonesia punya pelajaran tentang kejahatan kemanusiaan tentang konflik horizontal yang telah mengorbankan nyawa masyarakat diberbagai daerah. Pelajaran kerusuhan sosial tersebut harus diakhiri dengan kebutuhan tentang adanya politik multikulturalisme yang sesuai dengan model ke Indonesiaan yakni cerminan gagasan pengakuan keberagaman melalui toleransi dan tidak diskriminatif serta saling menghargai.

Pemerintah harus memiliki *political will* melalui kebijakan untuk memperkuat kembali antara *nation- building* melalui spirit kewarganegaraan dengan cara membuka peluang semua elemen kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen untuk berpartisipasi dalam mengelola negara. Hal ini dibutuhkan solidaritas nasional dari semua komunitas untuk berpartisipasi tanpa membedakan latar belakang sosial. Pemahaman tentang perpektif multikulturalisme dianggap mampu untuk mengatasi fenomena ego etnisitas diantara kelompok-kelompok masyarakat, dimana ada kesepakatan antara masyarakat dari berbagai kelompok sosial yang bersifat adil, saling mengakui dan menghormati tanpa memarginalkan kelompok etnis minoritas yang hidup bersama dengan kelompok etnis mayoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Irwan, 2006, *Tantangan Multikulturalisme Dalam Pembangunan*, Jurnal Antropologi Sosial Budaya, ETNOVISI, Vol. II, No.1 April 2006

- Aguero, Felipe, 1995, *Soldier, Civilians, And Democracy: Post Franco Spain In Comparative Perspective*, Baltimore & London: The John Hopkins University Press
- Bahar, Saafroedin, 1998, *Membangun Daerah Dalam Proses Nation-Building*, dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi, *Regionalisme, Nasionalisme Dan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Bennet, Robert, 1994, *Local Government And Market Decentralization*, Tokyo, PBB
- Cottey, Andrew, at al, 2001, *Democratic Control Of The Military In Post Comunist Europe: Guarding The Guards*, Basingstoke, Palgrave
- Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy Toward Cosolidation*, Yogyakarta IRE Press
-dan Marc Plattner 2000, (ed), *Hubungan Sipil-Militer Dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta Rajawali
- Eko, Sutoro, 2003, *Pengantar Pelajaran Konsolidasi Demokrasi Untuk Indonesia* dalam Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta IRE Press
- Luckhman, Robin, 1996, *Democracy And Military: An Epitaph For Frankenstein's, Democratization*, Vol.3 No. 2 Summer
- Maloney, Kim, 2007, *Representattive Bureaucracy: A Cross National Analysis of Gender (1996-2004)*.
- Mares, R.,David 1998, (ed), *Civil-Military Relations: building Democracy And Regional Security In Latin America, Southern Asia And Central Europe*, Colorado Westview Press
- Masoed, Mohtar, 1998, *Nasionalisme Dan Tantangan Global Masa Kini*, dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi, *Regionalisme, Nasionalisme Dan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Parekh, B. (2001) *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Syaifuddin, Achmad Fedyani, 2006, *Membumikan Multikulturalisme Di Indonesia*, Jurnal Antropologi Sosial Budaya, ETNOVISI, Vol. II, No.1 April 2006
- Stalik Svetiana, 2003, *Ukuran Dan demokrasi Dan Dukungan Untuk Desentralisasi*, Dalam Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Cosolidation*, Yogyakarta IRE
- Sujito, Arie dan Sutoro Eko, 2002, (eds), *Demiliterisasi, Demokratisasi Dan Desentralisasi*, Yogyakarta, IRE Press